



Analisis Implementasi E-audit untuk Pemeriksaan Keuangan Negara Studi pada BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Siti Mubiroh¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
mubiroh@unu-jogja.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:
 Tanggal Masuk 31 Januari 2019
 Tanggal Diterima 30 Maret 2019
 Tersedia *Online* 14 Juni 2019

Kata Kunci:
E-audit; Model DeLone dan McLean; dan Audit Sistem Informasi

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mempunyai peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK menghadapi permasalahan yaitu sumberdaya manusia yang terbatas dan waktu pemeriksaan yang terbilang singkat. Oleh karena itu, BPK mengembangkan sistem informasi e-audit dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Penelitian ini menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) dengan menggunakan enam komponen yaitu *System Quality*, *Information Quality*, *Service Quality*, *Information System Use*, *User Satisfaction*, dan *Net Benefits*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui implementasi e-audit secara mendalam. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah auditor BPK RI Perwakilan DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur pencarian utama dan Fitur Data Antar efektif digunakan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, sedangkan fitur LKPD belum efektif digunakan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan pada sistem akuntansi, sistem pengendalian internal, dan auditing (Gondodiyoto, 2007). Tujuan pemanfaatan teknologi informasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu (1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; (2)

Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; (4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan (5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Undang-Undang No. 15 Tahun 2006). Prinsip pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

BPK menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan tersebut terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas, sementara entitas yang diperiksa sangat banyak dengan waktu pemeriksaan sangat terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 17 disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, BPK mengembangkan sistem informasi e-audit dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. E-audit merupakan sistem berbentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e-auditee) melalui komunikasi data secara online dan membentuk pusat data (BPK, 2010).

Berdasarkan wawancara awal kepada narasumber auditor BPK perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), permasalahan dalam penelitian ini adalah auditor tidak menggunakan e-audit dalam memperoleh data laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dimana LKPD merupakan obyek utama pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-audit untuk pemeriksaan keuangan negara khususnya pada BPK Perwakilan DIY. Penelitian ini menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) yang terdiri atas enam komponen yaitu *System Quality*, *Information Quality*, *Service Quality*, *Information System Use*, *User Satisfaction*, dan

Net Benefits. Dengan menggunakan model tersebut diharapkan dapat diketahui kesuksesan implementasi e-audit BPK.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan adalah sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) dengan orang lain (*agents*) untuk melakukan beberapa pelayanan kepentingan prinsipal dengan melibatkan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Dalam hal ini agen tidak selalu melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan prinsipal, maka prinsipal akan mengeluarkan biaya *monitoring* yang dirancang untuk membatasi kegiatan agen yang menyimpang. Pada situasi lain prinsipal menuntut agen untuk mengeluarkan sumber daya (*bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan prinsipal.

Menurut Gudono (2012), teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Teori keagenan meramalkan jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal. Kepentingan agen dan prinsipal berbeda, akan terjadi *principal-agent problem*, yaitu agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya yang merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan agen tersebut menjadi *agency cost*. Konsep *agency cost* merupakan biaya pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai kontrak. Fungsi pengawasan terdapat pada audit internal dan audit eksternal. Dalam institusi pemerintahan daerah, audit internal dilakukan oleh inspektorat daerah sedangkan audit eksternal dilakukan oleh BPK perwakilan di setiap daerah.

2.2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK dijelaskan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas BPK tercantum dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Pasal 6, yang menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2.3. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLon dan McLean

DeLone dan McLean (2003) merumuskan model kesuksesan sistem informasi. Komponen model tersebut terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan sistem informasi, kepuasan pengguna, dan manfaat-manfaat bersih.

2.3.1. Kualitas Sistem

Komponen ini digunakan untuk mengetahui kualitas sistem dalam memproses informasi. Di lingkungan internet, kualitas sistem yang dinilai oleh pemakai di antaranya adalah *availability* (ketersediaan), *reliability* (keandalan), *adaptability* (kemampuan beradaptasi), *response time* (waktu respon), *ease of use* (mudah digunakan) (DeLone dan McLean, 2003).

2.3.2. Kualitas Informasi

Komponen ini digunakan untuk mengetahui output dari sistem informasi. Kualitas informasi dapat dilihat dari kelengkapan (*completeness*), mudah dipahami (*ease of understanding*), relevan (*relevant*), keamanan (*security*), keakuratan (*accuracy*) (DeLone dan McLean, 2003).

2.3.3. Kualitas Pelayanan

Menurut Jogiyanto (2007), munculnya *end user computing (EUC)* di pertengahan Tahun 1980 menyebabkan departemen sistem teknologi informasi tidak hanya menjadi penyedia informasi (*information provider*), tetapi juga penyedia pelayanan (*service provider*). Sebagai penyedia informasi, departemen sistem teknologi informasi memproduksi produk informasi kepada pemakainya dan sebagai penyedia pelayanan departemen ini menyediakan dukungan kepada pemakai akhir yang akan membangun sistemnya sendiri. Oleh karena itu, beberapa peneliti mengusulkan untuk memasukkan suatu pengukuran kualitas pelayanan (*service quality*).

2.3.4. Penggunaan Sistem Informasi

Komponen ini digunakan untuk mengetahui pemakaian output dari sistem informasi oleh pengguna. Penggunaan informasi dapat dilihat dari frekuensi penggunaan (*frequency of use*), waktu penggunaan (*time of use*) (DeLone dan McLean, 2003).

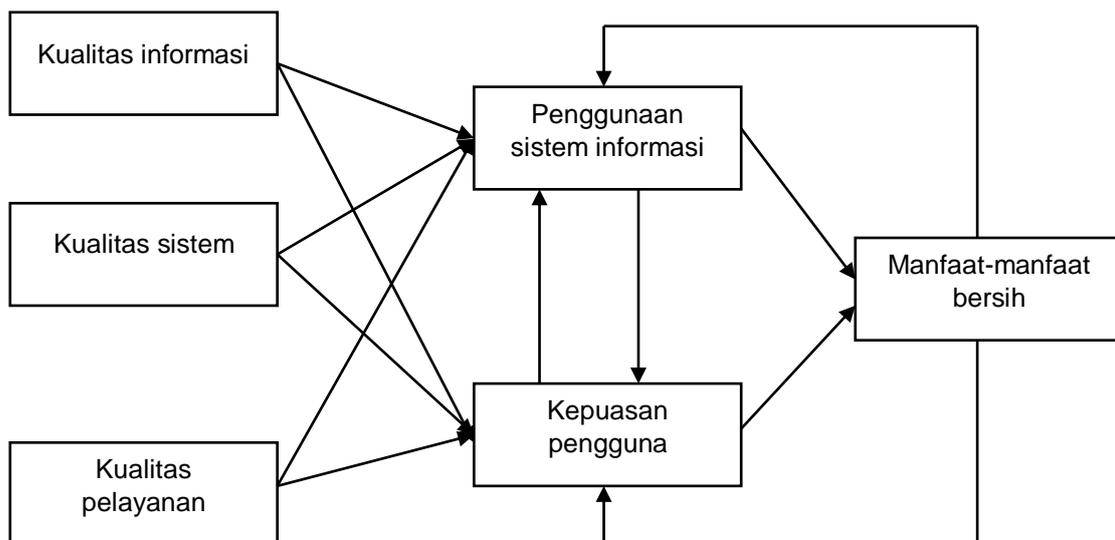
2.3.5. Kepuasan Pengguna

Komponen ini digunakan untuk mengetahui respon pengguna dalam penggunaan output yang dihasilkan dari sistem informasi. Kepuasan pengguna dapat dilihat dari *repeat to visit* atau akses berulang (DeLone dan McLean, 2003).

2.3.6. Manfaat-manfaat Bersih

Sebuah sistem *e-commerce* atau *e-business* dapat memberikan manfaat kepada pemakai tunggal, suatu grup dari pemakai, suatu organisasi, atau seluruh industri. Hal itu dapat diformulasikan ke dalam gambar berikut.

Gambar 1. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003)



Sumber: DeLone, William H dan McLean, Epharaim R. 2003. *The DeLone and McLean of Information System Success: A Ten-Year Update*. *Journal of Management Information Systems* 19 (4): 9-30.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Pertama, Cahyono dan Siswanto (2016) meneliti tentang analisis kelayakan e-audit untuk pemeriksaan keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara kepada pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem e-audit layak digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan.

Kedua, Maria dan Ariyani (2014) melakukan penelitian dengan judul *E-commerce Impact: The Impact of E-audit Implementation on The Auditor's Performance (Empirical Study Of The Public Accountant Firms in Semarang, Indonesia)*. Penelitian ini menggunakan metode survei. Data tersebut dianalisis menggunakan regresi sederhana. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-audit secara positif signifikan berpengaruh terhadap kinerja auditor.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami implementasi e-audit BPK secara mendalam. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu spesifik pada permasalahan yang terjadi pada BPK RI Perwakilan DIY mengenai implementasi e-audit untuk pemeriksaan keuangan negara.

3.2 Teknik Pemilihan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini ialah *nonprobability sampling* dengan menggunakan *snowball sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor BPK RI Perwakilan DIY dan agen konsolidator dengan pertimbangan auditor dan agen konsolidator sebagai pengguna langsung e-audit. Dengan demikian, kedua informan tersebut dipandang sangat mengerti tentang implementasi e-audit untuk pemeriksaan keuangan negara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum secara fokus pada hal-hal yang pokok terkait dengan implementasi e-audit untuk pemeriksaan keuangan negara pada BPK Perwakilan DIY.

3.3.2. *Penyajian Data*

Penyajian data dalam penelitian ini diformulasikan ke dalam gambar, tabel, dan teks yang bersifat naratif mengenai implementasi e-audit untuk pemeriksaan keuangan negara pada BPK Perwakilan DIY.

3.3.3. *Kesimpulan*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan hasil penelitian. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas. Setelah dilakukan penelitian, semula belum jelas menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa temuan dari hasil penelitian berupa gambaran mengenai implementasi e-audit untuk pemeriksaan keuangan negara pada BPK Perwakilan DIY.

3.4. Uji Validitas

Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kedua jenis triangulasi itu diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. *Triangulasi Sumber*

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dipilih dalam penelitian. Triangulasi ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasi atau diklasifikasi berdasarkan informasi yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Narasumber dalam penelitian ini adalah auditor BPK Perwakilan DIY. Apabila terdapat jawaban yang berbeda dari beberapa narasumber, penulis akan menganalisis data penelitian berdasarkan jawaban yang dominan.

3.4.2. *Triangulasi Teknik*

Triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1. E-audit BPK

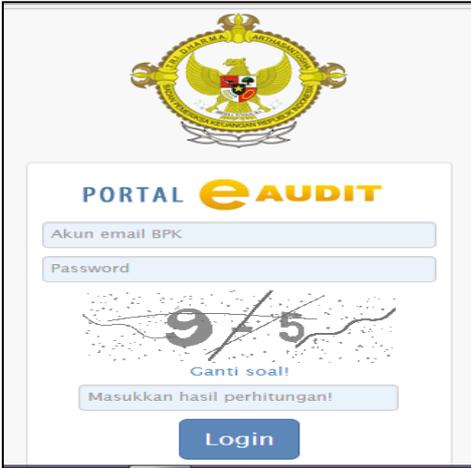
Terdapat tiga pendekatan audit berbasis komputer, yaitu *audit around the computer*, *audit through the computer*, dan *audit with the computer* (Gondodiyoto, 2007). Pendekatan *audit around the computer* dan *audit through the computer* dilakukan pada tahap pelaksanaan audit. Sedangkan, pendekatan *audit with the computer* dapat dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan audit.

Computer assisted audit technique (CAAT) atau teknik audit berbantuan komputer termasuk dalam pendekatan *audit with the computer*. CAAT hanya digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan audit. E-audit BPK termasuk dalam salah satu kategori teknik audit berbantuan computer yaitu teknik audit dengan menggunakan *software* audit.

BPK melakukan pemasangan perangkat agen konsolidator pada entitas pemeriksaan (*auditee*). Aplikasi tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu komponen agen konsolidator dan master konsolidator. Agen konsolidator terpasang pada entitas (*auditee*), sedangkan master konsolidator terpasang pada pusat data BPK. Agen konsolidator dan master konsolidator adalah sepasang aplikasi yang berfungsi sebagai ETL (*extract, transform, load*) dari sumber data yang ada di database entitas ke pusat data BPK.

BPK akan melakukan audit menggunakan portal e-audit setelah menerima LKPD dari pemerintah daerah yang sedang diaudit. Tahapan penggunaan e-audit yaitu auditor *log in* melalui portal e-audit dengan menggunakan akun email BPK dari masing-masing auditor dan memasukan password (Gambar 2). Syarat utama auditor dapat *log in* portal e-audit adalah auditor harus mempunyai surat tugas untuk melakukan audit. Kemudian auditor dapat memulai audit dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada e-audit (tabel 4.1).

Gambar 2. Portal E-audit BPK



The image shows the login interface of the BPK E-audit Portal. At the top center is the official logo of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) of Indonesia. Below the logo, the text "PORTAL eAUDIT" is displayed in blue and orange. The login form consists of several elements: a text input field for "Akun email BPK", a text input field for "Password", a CAPTCHA image showing the numbers "9/5" with a "Ganti soall" (Change question) link below it, a text input field for "Masukkan hasil perhitungan!" (Enter calculation result), and a blue "Login" button at the bottom.

Portal e-audit terdiri atas beberapa fitur, yaitu Fitur Pencarian Utama, Fitur Data Antar, Dan Fitur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Fitur portal e-audit diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Fitur Portal E-audit

No	Fitur	Data
1	Pencarian Utama	Manifes Garuda
		Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
		Nomor Identitas Wajib Pajak (NIDWP)
		Iuran Wajib Pegawai (IWP)
		Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)
2	Data Antar	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
		File Antar
		Transfer Daerah
3	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) PLN
		Komposisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		Komposisi Neraca
		Komposisi Laporan Arus Kas (LAK)
		Komposisi Surat Tanda Setoran (STS)
		Komposisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

4.2. *Fitur Portal E-audit*

4.2.1. *Fitur Pencarian Utama*

4.2.1.1. *Data Manifes Garuda*

Fitur ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan belanja perjalanan dinas pemerintah daerah. PT Garuda Indonesia menghubungkan data perjalanan dinas ke pusat data BPK. Selanjutnya, auditor dapat mengakses data dari portal e-audit untuk mengetahui informasi mengenai nama pegawai yang melakukan perjalanan dinas, nomor tiket, nomor penerbangan, asal dan tujuan penerbangan, tanggal keberangkatan, dan harga tiket. Belanja perjalanan dinas masuk ke dalam akun belanja pegawai pada LKPD. Prosedur penggunaan fitur ini sebagai berikut:

- A. Pilih tahun data
- B. Opsi pencarian:
 - i. Berdasarkan 15 digit nomor tiket
 - ii. Berdasarkan nama
- C. Masukkan kata kunci pencarian
- D. Pilih asal dan tujuan penerbangan (untuk pencarian berdasarkan nama).

Gambar 3. Pencarian data Manifes Garuda Indonesia

4.2.1.2. Data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Fitur ini digunakan untuk melakukan pencarian terkait dengan penerimaan negara. Jika ada transaksi dengan pihak ketiga, misalnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban memotong dan memungut PPN kemudian disetorkan ke kas negara. Fitur NTPN digunakan untuk memastikan bahwa PPN tersebut sudah atau belum diterima di kas negara. Pungutan tersebut masuk ke dalam akun kewajiban pada LKPD. Prosedur pencarian transaksi penerimaan negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. Pilih tahun data (tahun anggaran),
- B. Masukkan 15 digit atau 16 digit nomor NTPN.

Gambar 4.

Pencarian Data Penerimaan Negara Berdasarkan NTPN

4.2.1.3. Data Nomor Identitas Wajib Pajak (NIDWP)

Fitur ini digunakan untuk melakukan pencarian/konfirmasi terkait dengan penerimaan negara berdasarkan NIDWP. Prosedur pencarian/konfirmasi penerimaan negara berdasarkan NIDWP dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- A. Pilih tahun data (tahun anggaran),
- B. Masukkan 15 digit Nomor NIDWP.

Gambar 5. Pencarian Data Penerimaan Negara Berdasarkan NIDWP



The screenshot shows a web application interface for searching state revenue data based on NIDWP. At the top, there are three tabs: 'Deskripsi', 'Pencarian Tunggal', and 'Pencarian Jamak'. Below the tabs is a search panel titled 'Panel Pencarian'. It contains a dropdown menu for 'Tahun' (Year) with '2016' selected, a text input field for 'Masukkan Nomor NIDWP' (Enter NIDWP Number) with the placeholder text '15 Digit NIDWP', and a green 'Proses' (Process) button.

4.2.1.4. Data Iuran Wajib Pegawai (IWP)

Tujuan dari fitur ini ialah untuk melakukan pencarian data terkait dengan potongan IWP Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah daerah yang telah disetor oleh pemerintah daerah ke kas negara. PT Taspen menghubungkan data pegawai ke pusat data BPK, kemudian auditor mengakses portal e-audit untuk memastikan IWP sudah disetor ke kas negara. IWP masuk ke dalam akun kewajiban pada LKPD.

Prosedur penggunaan fitur ini adalah auditor menggunakan kata kunci nama provinsi/kabupaten/kota. Dalam menu potongan IWP PNS pemerintah daerah, auditor dapat melakukan pengujian terkait dengan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan pihak ketiga pegawai negeri sipil daerah, antara lain sebagai berikut.

- A. Ketepatan jumlah penyetoran kontribusi pemda terhadap iuran 2% asuransi kesehatan (ASKES).
- B. Ketepatan waktu penyetoran, pemerintah daerah menyetorkan iuran wajib PNS daerah, tabungan perumahan, dan iuran pemda ke kas negara melalui bank/pos persepsi dengan

menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP) selambat-lambatnya tanggal lima setiap bulan atau hari kerja berikutnya. Apabila tanggal lima adalah hari libur dapat dilakukan dengan melihat tanggal dokumen tidak melebihi ketentuan.

Gambar 6. Pencarian data IWP berdasarkan wilayah

4.2.1.5. Data Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)

Fitur ini digunakan untuk melakukan pencarian terkait data tabungan dan asuransi pensiun. PT Taspen menghubungkan data tabungan pegawai pemerintah daerah ke pusat data BPK, kemudian auditor mengakses portal e-audit untuk mengetahui bahwa tabungan pegawai tersebut sudah atau belum disetorkan ke PT Taspen. Taspen masuk ke dalam akun kewajiban pada LKPD.

Prosedur penggunaan menu pencarian data taspen dapat diunduh berdasarkan tahun, bulan, dan kata kunci nama kantor cabang, nama surat setoran bukan pajak (SSBP) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Gambar 7. Pencarian Data Taspen

4.2.1.6. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Fitur ini digunakan untuk melakukan pengujian data pegawai instansi berdasarkan data pada BKN. BKN menghubungkan data pegawai ke pusat data BPK kemudian auditor mengakses data BKN untuk mengecek jumlah pegawai yang sudah pensiun atau data kepegawaian lain. Data kepegawaian digunakan untuk memeriksa akun belanja pegawai pada LKPD. Prosedur penggunaan fitur ini adalah sebagai berikut:

- A. Masukan nomor induk pegawai (NIP) yang akan dicari pada salah satu kolom NIP
- B. Pencarian hanya menggunakan satu parameter nomor induk pegawai (NIP) saja (NIP baru/lama)
- C. NIP baru memiliki panjang 18 karakter, sedangkan NIP lama memiliki panjang 9 karakter.

Gambar 8. Pencarian Data BKN

The screenshot shows a web interface for searching BKN data. It features a header with the title 'Data Badan Kepegawaian Negara' and three navigation tabs: 'Deskripsi', 'Daftar Pegawai', and 'Pencarian Pegawai'. The 'Pencarian Pegawai' tab is selected. Below the tabs, there is a search form with two input fields. The first field is labeled 'NIP Baru Pegawai' and contains the example text 'Contoh : 198004212001021002'. To its right, it says 'Masukkan 18 digit NIP Baru'. Below this field is the word 'Atau'. The second field is labeled 'NIP Lama Pegawai' and contains the example text 'Contoh : 240001234'. To its right, it says 'Masukkan 9 digit NIP Lama'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Proses'.

4.2.2. Fitur Data Antar

Fitur ini digunakan untuk mengetahui data antarentitas. Fitur ini terdiri atas data dana transfer dan data pajak penerangan jalan umum (PPJU). Fitur data dana transfer untuk mengetahui besaran dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana transfer masuk ke dalam akun pendapatan transfer pada LKPD. Fitur data PPJU digunakan untuk mengetahui besaran pendapatan pajak daerah dari pajak penerangan jalan. PPJU masuk ke dalam akun pendapatan pajak daerah pada LKPD.

4.2.3. Fitur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Fitur LKPD terdiri atas beberapa komposisi yaitu komposisi laporan realisasi anggaran (LRA), komposisi neraca, komposisi laporan arus kas (LAK), komposisi surat tanda setoran

(STS) untuk mengecek akun pendapatan daerah, dan komposisi surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk mengecek akun belanja daerah. Prosedur pencarian komposisi fitur LKPD dapat dilakukan dengan cara:

- A. pilih tahun data, dan
- B. pilih data entitas.

Gambar 9. Pencarian Data Laporan Realisasi Anggaran

4.3. Implementasi E-audit Berdasarkan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean

4.3.1. Kualitas Sistem (System Quality)

Komponen ini digunakan untuk mengetahui kualitas sistem dalam memproses informasi. Kualitas sistem dapat dilihat dari keadaptasian (*adaptability*), ketersediaan (*availability*), waktu respon (*response time*), ketergunaan (*usability*), keandalan (*reliability*), mudah digunakan (*ease of use*) (DeLone dan McLean, 2003)

Implementasi e-audit pada BPK Perwakilan DIY dilakukan dengan tahap sosialisasi kepada auditor dan pemerintah daerah, kemudian BPK DIY mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) penggunaan e-audit secara terus-menerus. Dengan demikian, ketika auditor diwajibkan untuk menggunakan portal e-audit dalam pemeriksaan keuangan, auditor dapat beradaptasi dengan sistem e-audit secara mudah.

Fitur data manifes Garuda, data NTPN, data NIDWP, data IWP, data Taspen, data BKN, data dana transfer, dan PPJU dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh auditor. Auditor tidak perlu menunggu data yang diperlukan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini PT Garuda Indonesia, kantor pajak, PT Taspen dan BKN karena data yang dibutuhkan dari entitas tersebut sudah tersedia pada portal e-audit. Akan tetapi, untuk fitur LKPD ketersediaan data bergantung pada agen konsolidator di setiap pemerintah daerah. Untuk data LKPD auditor harus

menunggu serah terima dari pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian, auditor memperoleh data LKPD secara manual dalam arti tidak melalui portal e-audit. Data yang seharusnya diunggah oleh agen konsolidator diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jenis dan Periode Pengiriman Data

No	Jenis data	Periode pengiriman	Sumber data
1	Laporan penganggaran	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Produk-produk hukum yang terkait dengan anggaran belanja daerah	Tahunan	Dinas Hukum
3	Laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat	Tahunan	Inspektorat Kota
4	Neraca	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	Daftar aset tetap	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Laporan keuangan BUMD	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	Database sistem informasi keuangan (SIPKD)	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Wawancara kepada Agen Konsolidator Pemerintah Kota Yogyakarta

Portal e-audit memberikan informasi yang dibutuhkan oleh auditor secara cepat. Sebelum menggunakan portal e-audit, auditor harus meminta data atau melakukan konfirmasi langsung kepada pihak terkait. Hal tersebut membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu untuk mendapatkan data, sedangkan waktu pemeriksaan hanya dua bulan dan lingkup pemeriksaan sangat luas. Dengan adanya portal e-audit, auditor langsung bisa mengakses data yang ada di fitur e-audit secara otomatis. Akan tetapi, agen konsolidator di pemerintah daerah tidak secara cepat mengunggah data LKPD ke portal e-audit dengan alasan masih dilakukan *updating* data terbaru. Agen konsolidator seharusnya mengunggah data sebelum tim auditor BPK memulai melakukan pemeriksaan.

Informasi yang diperoleh dari portal e-audit dapat diandalkan untuk pemeriksaan. Hal tersebut dikarenakan data berasal dari institusi pemilik data. Oleh karena itu, dengan adanya e-audit, auditor sangat terbantu dalam melakukan proses pemeriksaan keuangan negara terutama pemeriksaan belanja perjalanan dinas, pendapatan daerah, dan akun kewajiban. Portal e-audit mudah digunakan selama auditor mempunyai surat tugas. Dengan memasukkan akun email BPK dan password, auditor langsung dapat mengakses e-audit secara mudah.

4.3.2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Komponen ini digunakan untuk mengetahui output dari sistem informasi. Kualitas informasi dapat dilihat dari kelengkapan (*completeness*), mudah dipahami (*ease of understanding*), relevan (*relevant*), keamanan (*security*), keakuratan (*accuracy*) (DeLone dan McLean, 2003).

Fitur e-audit belum mencakup semua data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Fitur e-audit hanya menyediakan data untuk pemeriksaan beberapa transaksi seperti perjalanan dinas, penerimaan kas negara, iuran pegawai, data kepegawaian, dan dana transfer dari pusat. Sedangkan, cakupan pemeriksaan BPK begitu luas. Tidak semua informasi dapat diperoleh dari portal e-audit, misalnya transaksi utang piutang yang melibatkan pihak ketiga (swasta), karena pihak swasta tidak ada hubungannya dengan keuangan negara sehingga sulit untuk menghubungkan data pihak swasta dengan e-audit.

Portal e-audit menghasilkan informasi yang mudah dipahami oleh auditor. Tujuan dari e-audit adalah untuk memudahkan auditor dalam memperoleh data keuangan. Oleh karena itu, sistem e-audit disesuaikan dengan kebutuhan auditor. Di samping itu, sebelumnya BPK sudah mengadakan pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan penggunaan portal e-audit secara terus-menerus.

Portal e-audit menyediakan data yang akurat dan relevan untuk pemeriksaan keuangan. Seperti data yang tersedia pada fitur data Manifes Garuda, data NTPN, data NIDWP, data IWP, data taspen, data BKN, data dana transfer, dan data PPJU. Akan tetapi, untuk data yang diperoleh dari fitur LKPD, tidak langsung dijadikan sebagai patokan pemeriksaan oleh auditor. Auditor membandingkan (konfirmasi) data yang diperoleh dari portal e-audit dengan data yang ada di lapangan. Jika data yang diterima oleh auditor sesuai dengan data yang ada di lapangan, data tersebut dikatakan akurat, relevan, dan cukup.

Portal e-audit hanya bisa diakses oleh auditor yang mempunyai surat tugas aktif. Auditor yang mempunyai surat tugas tersebut hanya dapat mengakses data pemerintah daerah yang sedang diperiksa. Auditor tidak dapat mengakses data pemerintah daerah yang bukan dalam pemeriksaannya.

4.3.3. Kualitas Pelayanan (*Service Quality*)

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh departemen sistem informasi terhadap kepuasan pengguna (DeLone dan McLean, 2003). Biro Teknologi Informasi (TI) BPK melakukan tugasnya dengan baik. Tugas Biro TI BPK adalah memastikan bahwa sistem e-audit bisa digunakan untuk proses pemeriksaan sehingga jarang terjadi gangguan pada sistem. Dalam proses pemeriksaan, auditor melakukan *login* ke portal e-audit

menggunakan *email* dan *password*. Apabila auditor lupa *email* BPK maupun *password*, khususnya auditor yang sudah senior, auditor hendaknya melapor kepada bagian Biro TI perwakilan. Selanjutnya, Biro TI perwakilan menghubungi Biro TI pusat untuk membukakan *password* auditor tersebut.

Biro TI BPK memberikan pelayanan dengan cepat. Jika ditemukan adanya kelemahan pada sistem e-audit, maka Biro TI BPK segera melakukan pembaruan versi e-audit untuk perbaikan mekanisme fungsi akses serta penyempurnaan fitur portal.

4.3.4. Penggunaan Sistem Informasi (System Information Use)

Komponen ini digunakan untuk mengetahui pemakaian output dari sistem informasi oleh pengguna. Penggunaan informasi dapat dilihat dari frekuensi penggunaan (*Frequency of use*) dan waktu penggunaan (*time of use*) (DeLone dan McLean, 2003).

Auditor menggunakan portal e-audit setiap melakukan pemeriksaan. Selain membantu proses pemeriksaan, penggunaan e-audit dipantau oleh BPK pusat sebagai indikator kinerja BPK perwakilan. Oleh karena itu, auditor BPK Perwakilan diwajibkan menggunakan portal e-audit dalam proses pemeriksaan.

Waktu untuk mengakses e-audit tergantung pada banyaknya data yang akan diolah oleh auditor. Semakin banyak data yang akan diolah semakin lama auditor mengakses portal e-audit. Fitur yang diakses oleh masing-masing auditor berbeda tergantung pada akun yang sedang diperiksa. Dalam satu tim terdiri dari ketua tim dan beberapa anggota, setiap anggota memeriksa akun yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan fitur e-audit disesuaikan dengan akun yang sedang diperiksa oleh auditor.

4.3.5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Komponen ini digunakan untuk mengetahui respon pengguna dalam penggunaan output yang dihasilkan dari sistem informasi. Kepuasan pengguna dapat dilihat dari akses berulang (*repeat to visit*) (DeLone dan McLean, 2003).

Auditor merasa puas dengan fitur yang sudah ada pada portal e-audit. Dengan harapan ada penambahan fitur untuk data-data yang belum terhubung dengan portal e-audit. Dengan kepuasan terhadap fitur portal e-audit tersebut mengakibatkan auditor selalu mengakses portal e-audit setiap melakukan pemeriksaan. Di samping itu, penggunaan e-audit dievaluasi oleh BPK pusat sebagai indikator kinerja BPK Perwakilan sehingga auditor diwajibkan untuk mengakses e-audit untuk membantu proses pemeriksaan.

4.3.6. *Manfaat-Manfaat Bersih*

Manfaat bersih dapat diketahui dari konteks dan tujuan dikembangkannya sistem tersebut sehingga ada pengukuran yang berbeda di setiap investasi sistem informasi. Manfaat bersih meliputi manfaat individual dan manfaat organisasional (DeLone dan McLean, 2003).

Tujuan dari portal e-audit yaitu membantu auditor untuk memperoleh data secara cepat dan mudah. Fitur data manifes Garuda, data NTPN, data NIDWP, data IWP, data Taspen, data BKN, data dana transfer, dan PPJU menyediakan data yang dibutuhkan oleh auditor secara otomatis. Sebelum adanya portal e-audit, auditor harus melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait seperti kantor PT Garuda Indonesia dan kantor pajak. Dengan demikian, auditor harus menunggu instansi tersebut menyiapkan data dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan adanya portal e-audit sangat bermanfaat bagi auditor secara individual dan BPK Perwakilan secara organisasional.

Dalam pengembangan sistem e-audit dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam hal ini Biro TI, auditor, dan agen konsolidator. Dengan demikian, tujuan pengembangan sistem e-audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dapat dicapai.

4.4. *Kendala Implementasi E-audit pada BPK Perwakilan DIY*

Kendala yang dihadapi oleh auditor dalam implementasi e-audit adalah fitur e-audit belum mencakup semua data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan cakupan pemeriksaan sangat luas dan tidak semua data terhubung dengan e-audit. Kemudian, ketidaksediaan data dalam fitur LKPD juga menjadi kendala bagi auditor saat melaksanakan audit. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dari entitas pemerintah daerah untuk mengunggah data LKPD ke portal e-audit. Dengan demikian, untuk memperoleh LKPD, auditor harus menunggu entitas pemerintah daerah.

Belanja perjalanan dinas hanya dapat diketahui jika perjalanan dinas menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Portal e-audit belum menyediakan fitur maskapai lain ataupun transportasi lain. Kemudian, harga yang tercantum dalam Fitur Manifes Garuda adalah harga yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia dan tidak termasuk harga agen. Dengan demikian, jika pembelian tiket Garuda Indonesia melalui agen, maka informasi yang didapat berbeda dengan yang ada di portal e-audit.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran.

5.1. Kesimpulan

Fitur portal e-audit yang digunakan untuk pemeriksaan keuangan negara meliputi Fitur Pencarian Utama, Fitur Data Antar, dan Fitur LKPD. Fitur pencarian utama meliputi data manifes garuda, data NTPN, data NIDWP, data IWP, data Taspen, dan data BKN. Fitur Data Antar meliputi data dana transfer, dan data PPJU. Kemudian Fitur LKPD meliputi data komposisi LRA, komposisi neraca, komposisi LAK, komposisi STS, dan komposisi SP2D. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fitur Pencarian Utama dan Fitur Data Antar efektif digunakan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, Fitur LKPD belum efektif digunakan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini ialah peneliti tidak dapat menentukan kriteria narasumber, dalam hal ini narasumber auditor senior dan auditor junior. Hal ini karena narasumber telah ditentukan oleh objek penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini hanya auditor junior.

5.3. Saran

BPK Perwakilan DIY dapat mengusulkan kepada Biro Teknologi Informasi BPK Pusat untuk menambahkan fitur maskapai lain dan transportasi lain untuk mengetahui data perjalanan dinas serta fitur data yang belum terhubung dengan e-audit BPK. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pada BPK perwakilan yang lain. Pertimbangannya ialah bahwa setiap BPK perwakilan mempunyai kendala yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model kesuksesan sistem informasi yang berbeda untuk mengetahui hasil yang berbeda.

Daftar Pustaka

- BPK. 2010. "Selayang Pandang E-audit". Diakses pada Hari Jum'at Tanggal 19 Agustus 2016 Pukul 11.20. www.bpk.go.id/page/selayang-pandang.
- Cahyono, Tofanstyo dan Siswanto, Dodik. 2016. Analisis Kelayakan E-Audit Untuk Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 19*.
- DeLone, William H dan McLean, Epharaim R. 2003. The DeLone and McLean of Information System Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems* 19 (4): 9-30.

- Gondodiyoto, Sanyoto. 2007. *Audit Sistem Informasi + Pendekatan COBIT*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gudono. 2012. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE
- Jensen & Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3 : 305-360
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI
- Maria, Evi dan Ariyani, Yayuk. 2014. E-Commerce Impact: The Impact of E-Audit Implementation on the Auditor's Performance. *Indian Journal of Commerce dan Management Studies* 5 (3): 1-7.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan pihak ketiga pegawai negeri sipil daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.